



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2018/PA Prgi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Rian Makaribu bin Djamlin, tempat dan tanggal lahir olobaru, 12 April 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon I;
dan

Nurfiani binti Jasmin, tempat dan tanggal lahir silanga, 12 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan bukti-butki yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 21 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan Nomor 300/Pdt.P/2018/PA Prgi., para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar diitsbatkan pernikahan mereka dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syare'at Islam di rumah Pemohon II di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Ruka (Almarhum).
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Jasmin bin Tome dengan saksi-saksi Nikah masing-masing:
 - a. Djamlin Bin Makaribu
 - b. Rizain bin Nurdin

Dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 16 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangn yang berlaku;

5. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan karena pada saat itu Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan dan mengurus Pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sehingga para Pemohon sangat

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi Guna menjadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor 140/391/DO/X/2018 oleh karenanya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma
- c. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 19 Juli 2012, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya sebagai berikut:

Saksi I, Rizain bin Nurdin, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Olabaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2012;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon bernama Jasmin bin Tome;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan yang bernama Ruka setelah wali Pemohon II melimpahkan kepada PPPN tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Jamlin bin Makaribu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur sekitar 20 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 16 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi II, Djamilin bin Makaribu, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Olabaru, Kecamatan Parigi Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon bernama Jasmin bin Tome;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan yang bernama Ruka setelah wali Pemohon II melimpahkan kepada PPPN tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Rizal bin Nurdin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur sekitar 20 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 16 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan alasan bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, dihadapan PPPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan yang bernama Ruka, dan segala syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, hal. 144 huruf angka (1) dan (2), yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan isteri, maka proses pemeriksaannya dilaksanakan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan *a quo*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *voluntair* dan Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Olabaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni Rizain bin Nurdin dan Djamlin bin Makaribu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Olabaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasmin bin Tome dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Rizain bin Nurdin dan Djamlin bin Makaribu;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab kabul yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan bernama Ruka dan ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Olabaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jasmin bin Tome, telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang bernama Ruka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Rizain bin Nurdin dan Djamlin bin Makaribu. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24]."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan pada saat dilangsungkan acara pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, begitupun selama surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditempel (diumumkan) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan ataupun intervensi, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), maka berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....” dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan diberikan secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pihak KUA dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang bernama Ruka hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahkan prosesi akad nikah diwakilkan kepada Pembantu PPN tersebut untuk melakukan ijab kabul. Oleh karena itu, kehadiran pihak dari Kantor Urusan Agama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan dan dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah, sehingga tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada buku register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan,

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam alasan sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi dengan permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya, dan juga dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan menguatkan identitas hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan melindungi hak dan kepentingan bagi isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak adanya halangan ataupun larangan untuk Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai pasangan suami isteri, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Olabaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dapat dinyatakan sah. Dengan demikian, petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara. Namun berhubungan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan orang yang tidak mampu dan telah dibebaskan dari

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara, maka sesuai Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, jo. Pasal 60B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Rian Makaribu bin Djamlin) dengan Pemohon II, (Nurfiani binti Jasmin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Biaya Penetapan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun Anggaran 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H dan Ummu Rahmah, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Qadariyah, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.



Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Ummu Rahmah, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Qadariyah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 95.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama

Parigi

Panitera

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 300Pdt.P/2018/PA Prgi.